

## ABSTRAK

Pencemaran laut di Indonesia membuat banyaknya kerugian yang terjadi khususnya pada sektor laut. Terjadinya pencemaran laut mengakibatkan penurunan kapasitas produksi yang bersumber dari laut, produktivitas laut, dan tercemarnya Sumber Daya Laut. Bagaimana pengaturan dan peran pemerintah Indonesia dalam penyelesaian pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan minyak di wilayah perbatasan perairan Indonesia Australia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran pemerintah Indonesia dalam penyelesaian pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan minyak di wilayah perbatasan perairan Indonesia Australia mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai. Namun Perusahaan PTTEP Australasia tidak juga mengedepankan iktikad baik untuk menyelesaikan kasus ini melalui forum yang telah disediakan dan tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada negara tercemar akibat dari tumpahan minyak yang terjadi tersebut. Pemerintah Indonesia dapat menggugat Australia jika Indonesia bisa membuktikan bahwa adanya intruksi pemerintah Australia dalam pengoprasian eksploitasi sumur minyak montara tersebut. Pengajuan penyelesaian sengketa melalui jalur perdata yaitu dengan menggunakan gugatan kelompok (*Class Action*) ke Pengadilan Federal Australia di Sidney, Australia merupakan pembuka jalan dalam penyelesaian kasus ini.

**Kata kunci** : hukum lingkungan, pencemaran laut, sengketa, peran pemerintah.